

Konflik dan Kekerasan: Beberapa Studi Kasus di Indonesia

Awaluddin, Ahmadin, Bakhtiar

Program Pascasarjana, Universitas Negeri Makassar

Gmail: awaluddinsaputra2@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the dynamics of conflict and violence in Indonesia, including the root causes, patterns of escalation, and their impact on social and political stability. Employing a qualitative method, this research examines conflict theory and case studies in Indonesia such as Maluku, Papua, and Poso. The results indicate that structural injustice, social discrimination, and the struggle for resources are the primary triggers of conflict. Violence exacerbates the cycle of conflict and has long-term consequences. Repressive approaches have proven to be less effective and instead increase tensions. This study emphasizes the importance of dialogue, community reconciliation, and inclusive policies to achieve sustainable peace. These findings contribute to the study of conflict management and offer policy perspectives for reducing conflict in Indonesia.

Keywords: *conflict, violence, structural injustice, reconciliation, indonesia*

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik dan kekerasan di Indonesia, termasuk akar penyebab, pola peningkatan, serta dampaknya pada stabilitas sosial dan politik. Dengan metode kualitatif, penelitian ini mengkaji teori konflik dan studi kasus di Indonesia seperti Maluku, Papua, dan Poso. Hasilnya menunjukkan bahwa ketidakadilan struktural, diskriminasi sosial, dan perebutan sumber daya menjadi pemicu utama konflik. Kekerasan memperburuk siklus konflik dan menimbulkan dampak jangka panjang. Pendekatan represif terbukti kurang efektif dan justru meningkatkan ketegangan. Studi ini menekankan pentingnya dialog, rekonsiliasi komunitas, dan kebijakan inklusif untuk mencapai perdamaian berkelanjutan. Temuan ini berkontribusi pada studi manajemen konflik dan menawarkan perspektif kebijakan untuk mengurangi konflik di Indonesia.

Kata kunci: *konflik, kekerasan, ketidakadilan struktural, rekonsiliasi, indonesia*

Pendahuluan

Konflik dan kekerasan merupakan fenomena sosial yang terus terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kepentingan antara dua pihak atau lebih yang dapat berkembang menjadi kekerasan jika tidak dikelola dengan baik. Sementara itu, kekerasan merujuk pada tindakan yang menyebabkan kerugian fisik, psikologis, atau material bagi individu maupun kelompok. Bentuk kekerasan dapat berupa konflik horizontal, seperti bentrokan antar kelompok masyarakat, maupun konflik vertikal yang melibatkan negara dan kelompok tertentu. Kekerasan bukan hanya hasil dari perbedaan ideologi, tetapi juga cerminan dari ketidakadilan struktural dalam masyarakat¹. Konflik dan kekerasan juga dapat terjadi dalam berbagai sektor kehidupan, seperti dalam ranah politik, ekonomi, dan sosial, yang sering kali berimbas pada ketidakstabilan suatu wilayah.

Berbagai faktor telah menjadi penyebab utama munculnya konflik, mulai dari ketimpangan sosial, diskriminasi, perebutan sumber daya, hingga ketidakstabilan politik. Konflik sosial dapat berkembang menjadi kekerasan jika tidak dikelola dengan baik, terutama dalam masyarakat yang memiliki ketimpangan sosial yang tinggi². Konflik sering kali berakar pada ketidakadilan struktural yang menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Diskriminasi terhadap kelompok tertentu dapat memicu ketegangan yang berujung pada bentrokan fisik. Selain itu, perebutan sumber daya alam, kemiskinan, serta perbedaan etnis dan agama juga menjadi pemicu utama dalam berbagai konflik yang terjadi di Indonesia. Dalam banyak kasus, konflik yang tidak tertangani dengan baik dapat mengarah pada kekerasan berkepanjangan dan memperburuk situasi keamanan nasional.

Konflik etnis dan agama sering diperparah oleh intervensi politik dan ekonomi³. Di Indonesia, konflik Dayak-Madura (2001) di Kalimantan Tengah dipicu ketegangan

¹ Syifa Sabrina et al., "Praktik Ketidakadilan Gender Pada Novel Kushin Techō Karya Emi Yagi," *Mahadaya: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya* 4, no. 2 (2024): 239–48, <https://doi.org/10.34010/mhd.v4i2.13814>.

² Khansa Nabilla, Rahma Titania, and Dita Aprilia, "Keterlibatan Masyarakat Dalam Isu Lingkungan : Kasus Tambang Emas Di Banyuwangi," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Politik (JPKP)* 2, no. 2 (2024): 153–63, <https://doi.org/10.61476/dv6m0y79>.

³ Sus Eko Zuhri Ernada, Honest Dody Molasy, and Adhiningasih Prabhawat, *Nasionalisme Dan Etnopolitik Dalam Hubungan Internasional: Konsep, Teori, Dan Aplikasi* (Indonesia Emas Group, 2024).
Vol. 10 No. 1 Juni 2025

sosial dan ekonomi. Konflik agama di Poso (1998-2001) menunjukkan bagaimana perbedaan keyakinan dimanfaatkan untuk destabilisasi. Pasca Orde Baru, agama menjadi media efektif mobilisasi massa dalam konflik, meskipun bukan faktor utama⁴. Konflik agraria dan sumber daya alam di negara berkembang, seperti yang tergambar dalam kasus Mesuji (2011) dan Papua (2013) di Indonesia, menyoroti bagaimana ambiguitas regulasi pertanahan dan eksploitasi sumber daya dapat memicu konfrontasi fisik dan ketegangan antara masyarakat lokal, perusahaan, serta pemerintah⁵. Konflik-konflik ini bersifat kompleks, dipengaruhi oleh interaksi faktor struktural, ekonomi, politik, dan sosial-budaya, yang menghasilkan dampak luas terhadap kondisi sosial-ekonomi regional dan hubungan antarwilayah.

Teori-Teori Kekerasan dan Konflik

Kekerasan dan konflik, fenomena sosial persisten sepanjang sejarah, melampaui manifestasi fisik dan mencakup dimensi struktural, simbolik, serta kultural. Berbagai teori ilmu sosial, termasuk kontribusi Galtung, Camara, Bourdieu, dan Arendt, berupaya memediasi pemahaman mekanisme kekerasan, dinamika konflik, dan genealogi kejahatan berskala besar yang terinternalisasi. Analisis teoritis ini krusial untuk mengidentifikasi akar penyebab dan pola-pola konflik sosial.

1. Piramida Kekerasan Johan Galtung

Tinjauan ilmiah terhadap konsep Piramida Kekerasan Galtung mengklasifikasikan kekerasan dalam masyarakat menjadi tiga strata hierarkis. Lapisan basal adalah kekerasan kultural, yang merujuk pada legitimasi nilai, norma, dan ideologi budaya terhadap manifestasi kekerasan lainnya. Di atasnya terdapat kekerasan struktural, yang terinternalisasi dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik, menghasilkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Puncak piramida adalah kekerasan langsung, berupa tindakan fisik yang kasatmata, sering kali merupakan konsekuensi dari kekerasan struktural dan dinormalisasi oleh kekerasan kultural.

2. Spiral Kekerasan Dom Helder Camara

⁴ Sari Seftiani et al., *Wajah Pluralitas Yang Tergerus: Intoleransi Dan Radikalisme Di Sembilan Daerah* (PT Kanisius., 2020).

⁵ Agus Rohmat Hidayat et al., "Sengketa Laut Cina Selatan: Analisis Realis Terhadap Perebutan Kekuasaan, Respon Regional, Dan Implikasi Geopolitik," *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 2 (2024): 579–91, <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i2.1041>.

Konsep Spiral Kekerasan dari Dom Helder Camara memaparkan dinamika eskalasi kekerasan melalui tiga tahapan. Kekerasan struktural, yang berakar pada ketidakadilan sosio-ekonomi-politik (misalnya, kemiskinan ekstrem, eksploitasi), menciptakan kondisi penderitaan dan ketidakpuasan. Sebagai respons, muncul kekerasan pemberontakan dari kelompok tertindas dalam bentuk perlawanan (protes hingga gerakan bersenjata). Selanjutnya, kekerasan represif dari pihak berkuasa (misalnya, penindasan militer, kriminalisasi) memperburuk ketidakadilan dan melanggengkan siklus kekerasan.

Metode

Penulisan ini dibuat dengan metode penelitian literatur review yang mana memberikan keluaran terhadap data yang ada, serta penjabaran dari suatu penemuan sehingga dapat dijadikan suatu contoh untuk kajian penelitian dalam menyusun atau membuat pembahasan dan penjelasan dari isi masalah yang akan diteliti. Penulis mencari data atau bahan literatur dari jurnal atau artikel dan juga referensi dari buku sehingga dapat dijadikan suatu landasan yang kuat dalam isi atau pembahasan. Adapun isi terkait dengan penggunaan metode penelitian systematic literature dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan beberapa jurnal-jurnal serta diambil beberapa data dan dibuat beberapa kesimpulan setelah ditelaah secara mendalam melalui cara yang rinci agar terdapat hasil akhir yang baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Isi Dan Pembahasan

Dinamika Konflik dan Kekerasan

Telaah literatur ini akan membahas dinamika konflik dan kekerasan di Indonesia dengan tiga fokus utama: pertama, bagaimana konflik muncul akibat diskriminasi, ekonomi, dan perebutan kekuasaan; kedua, bagaimana kekerasan memperparah siklus konflik; dan ketiga, bagaimana pola konflik di Indonesia memiliki kesamaan dengan konflik di tingkat global, Johan Galtung mengembangkan konsep kekerasan dalam tiga bentuk, kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural.

1. Konflik Muncul Akibat Diskriminasi, Ekonomi, dan Perebutan Kekuasaan

Konflik di Indonesia sering kali dipicu oleh ketidaksetaraan sosial, ketimpangan ekonomi, dan perebutan kekuasaan. Konflik di Indonesia sering kali dipicu oleh faktor

ekonomi dan politik yang memperburuk ketegangan sosial.⁶ Ketimpangan distribusi sumber daya yang tidak adil dapat menyebabkan ketidakpuasan yang meluas di masyarakat, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya bentrokan. Teori konflik dari Ralf Dahrendorf menjelaskan bahwa konflik muncul sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap distribusi kekuasaan dan sumber daya yang tidak merata.

a. Konflik Maluku (1999-2002)

Konflik komunal di Maluku, yang melibatkan komunitas Muslim dan Kristen, merupakan manifestasi dari diskriminasi dan persaingan politik lokal. Ketegangan antaragama tereksploitasi untuk kepentingan politik, berakar pada ketidakpuasan distribusi jabatan pemerintahan dan rivalitas ekonomi. Intervensi kelompok bersenjata memperparah konflik, mengakibatkan ribuan korban jiwa dan pengungsian, serta memicu segregasi agama yang berkelanjutan dan menghambat rekonsiliasi⁷.

b. Konflik Papua

Konflik berkepanjangan di Papua berakar pada ketidaksetaraan sosial, politik, dan ekonomi pasca-integrasi dengan Indonesia, yang diperparah oleh marginalisasi masyarakat lokal dalam pembangunan nasional dan pengelolaan sumber daya alam. Eksploitasi sumber daya alam menjadi pemicu ketidakpuasan, diperburuk oleh pendekatan militer terhadap gerakan separatis yang memicu kekerasan dan polarisasi antara masyarakat asli Papua dan pendatang, serta erosi kepercayaan terhadap pemerintah. Ketidakseimbangan kebijakan pembangunan ini, yang dapat dianalisis melalui teori kekerasan struktural Galtung, melanggengkan konflik di Papua⁸⁹.

2. Kekerasan Memperparah Siklus Konflik

Kekerasan dalam suatu konflik sering kali menyebabkan eskalasi dan memperpanjang siklus konflik. Ketika kekerasan digunakan sebagai solusi, konflik cenderung semakin sulit diselesaikan secara damai. Hal ini terjadi karena trauma dan

⁶ Davidson, J. S. (2009). *Violence and politics in Indonesia: Transition and fragile democracy*. Cambridge University Press.

⁷ Bertrand, J. (2004). *Nationalism and ethnic conflict in Indonesia*. Cambridge University Press.

⁸ Sakinah Pokhrel, "Sejarah Otonomi Khusus Papua Sebuah Upaya Menyelesaikan Konflik," *Journal Syntax Idea* 6, no. 9 (2024): 6077–81.

⁹ Delvia Ananda Kaisupy and Skolastika Genapang Maing, "Proses Negosiasi Konflik Papua: Dialog Jakarta-Papua," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 10, no. 1 (2021): 8298, <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i1.27056>.

ketidakpercayaan yang dihasilkan dari kekerasan cenderung diwariskan kepada generasi berikutnya, menyebabkan konflik berkepanjangan yang sulit dihentikan. Ketidakadilan struktural menciptakan ketidakpuasan yang meluas, yang kemudian dapat berujung pada pemberontakan, dan akhirnya direspons dengan kekerasan represif oleh pihak yang berkuasa.

a. Konflik Poso (1998-2001)

Konflik Poso mencerminkan pola konflik sektarian berbasis agama yang diperburuk oleh faktor sosial dan politik¹⁰. Awalnya, ketegangan antara Muslim dan Kristen muncul akibat persaingan politik lokal. Ketidakadilan struktural merupakan faktor utama yang memperpanjang konflik di wilayah-wilayah dengan sejarah ketegangan etnis dan agama¹¹. Namun, kekerasan yang terjadi memperpanjang siklus konflik dengan menimbulkan dendam antar-kelompok. Jika dianalisis menggunakan konsep kekerasan kultural Galtung, maka perbedaan agama dijadikan alat legitimasi untuk melakukan kekerasan, sementara kekerasan struktural seperti ketimpangan sosial memperparah ketegangan. Dalam konteks teori Spiral Kekerasan, respons represif dari aparat keamanan semakin meningkatkan eskalasi konflik dan memperpanjang kekerasan yang berlangsung bertahun-tahun.

b. Konflik Sambas (1999)

Konflik etnis antara Dayak dan Madura di Sambas merupakan contoh kekerasan yang berulang akibat ketimpangan sosial dan ekonomi¹². Suku Madura dianggap menguasai sektor ekonomi lokal, sementara masyarakat Dayak merasa terpinggirkan. Konflik ini mencerminkan teori konflik sosial Ralf Dahrendorf yang menjelaskan bagaimana kelompok yang merasa tertindas akan berusaha melawan dominasi kelompok lain. Kekerasan yang terjadi semakin memperdalam segregasi sosial, memperkuat stereotip, dan menciptakan trauma kolektif di kalangan masyarakat. Seperti dalam teori kekerasan struktural Galtung, Dalam banyak kasus, kekerasan negara sering

¹⁰ Wijaya Nanang, "Resolusi Konflik Berbasis Budaya Oleh Masyarakat Kabupaten Poso," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 1 (2016): 58–73.

¹¹ Afif Muhammad, *Agama Dan Konflik Sosial: Studi Pengalaman Indonesia* (Penerbit Marja, 2020).

¹² Atem, "Konflik Etnik Madura Dan Melayu Sambas: Tinjauan Konflik Kekerasan Johan Galtung," *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan* 11, no. 2 (2022): 1–16, <https://doi.org/10.37304/jispar.v11i2.5304>.

kali memperburuk konflik yang ada, alih-alih menyelesaikannya¹³. konflik ini terjadi bukan hanya karena kebencian etnis, tetapi juga akibat kebijakan yang tidak adil dalam distribusi sumber daya.

3. Konflik lokal dan global memiliki pola yang mirip

Konflik yang terjadi di Indonesia memiliki pola yang mirip dengan konflik di berbagai negara lain di dunia. Ketidakadilan struktural, diskriminasi berbasis etnis dan agama, serta perebutan sumber daya merupakan faktor-faktor yang sering menjadi pemicu utama konflik di berbagai belahan dunia¹⁴. Sejumlah teori konflik global seperti analisis Pierre Bourdieu mengenai kekerasan simbolik dapat membantu memahami bagaimana konflik di Indonesia mencerminkan pola yang sama dengan konflik di dunia internasional.

a. Konflik Suriah (2011 - 2019) dan Konflik Papua

Konflik di Suriah, yang bermula dari ketidakpuasan terhadap pemerintahan Bashar al-Assad, menunjukkan paralel dengan konflik di Papua. Kedua kasus ini berakar pada ketidakadilan struktural, disparitas ekonomi, dan respons militeristik terhadap protes atau perlawanan¹⁵¹⁶. Pola konflik di Indonesia memiliki kemiripan dengan konflik di negara lain, seperti Bosnia dan Suriah, di mana ketidakadilan struktural menjadi pemicu utama ketegangan sosial¹⁷¹⁸¹⁹. Sebagaimana konflik di Papua, konflik di Suriah juga mengalami eskalasi menjadi kekerasan berkepanjangan

¹³ Susetiawan, Bahrudin, and Milda L. Pinem, *Pembangunan Sosial Dan Kesejahteraan: Jejak Pemikiran Pendekatan Dan Isu Kontemporer* (Gajah Mada University Press, 2022).

¹⁴ Muliono Muliono, "Pola Perubahan, Wacana, Dan Tren Konflik Sosial Di Indonesia," *Al-Adyan: Journal of Religious Studies* 1, no. 2 (2020): 115–32, <https://doi.org/10.15548/al-adyan.v1i2.1949>.

¹⁵ Syarifurohmat Pratama Santoso and Christine Anggi Sidjabat, *Power Negara* (Depublish, n.d.).

¹⁶ Frans Kenny Chandra et al., "Analisis Konflik HAM Yang Terjadi Di Papua," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral* 1, no. 1 (2023): 62–77, <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.

¹⁷ Theresia Dwiati Wismarini et al., "Identifikasi Pola Konflik Lahan Perkebunan Di Lingkungan PTPN Group Berbasis Data Hukum Menggunakan Hierarchical Clustering Dengan Algoritma Agglomerative," *Jurnal Fasilkom* 14, no. 3 (2024): 654–66.

¹⁸ M. Taufiq Rachman, *Agama Dan Politik Identitas Dalam Kerangka Sosial* (Prodi S2 Studi Agama-Agama: UIN Sunan Gunung Djati Bandung Redaksi., 2020).

¹⁹ Frances Stewart, *Horizontal Inequalities and Conflict*, *Elgar Handbook of Civil War and Fragile States*, 2008, <https://doi.org/10.1057/9780230582729>.

akibat intervensi aktor bersenjata dengan kepentingan politik²⁰. Mengacu pada konsep Johan Galtung, konflik ini dapat dikategorikan sebagai kombinasi kekerasan struktural, kultural, dan langsung yang berulang tanpa resolusi komprehensif.

b. Konflik Bosnia (1992-1995) dan Konflik Maluku (1999-2002)

Perang Bosnia yang berlangsung pada awal 1990-an memiliki pola yang serupa dengan konflik di Maluku. Keduanya merupakan konflik berbasis etnis dan agama yang dipicu oleh ketidakpuasan sosial serta persaingan politik. Dalam konflik Bosnia, perpecahan antara kelompok Bosnia Muslim, Serbia, dan Kroasia menyebabkan perang saudara yang berakhir dengan intervensi internasional²¹. Sementara itu, di Maluku, konflik antara komunitas Muslim dan Kristen berlangsung selama bertahun-tahun dengan ribuan korban jiwa dan pengungsian massal²². Berdasarkan teori konflik sosial Lewis Coser, konflik ini mencerminkan bagaimana perbedaan kelompok yang semakin tajam dapat menjadi pemicu ketegangan yang sulit diselesaikan tanpa adanya rekonsiliasi jangka panjang.

Upaya Penyelesaian Konflik

1. Dialog dan Rekonsiliasi Lebih Efektif Dibandingkan Represi

Pendekatan represif dalam menangani konflik sering kali hanya menekan gejala yang ada tanpa menyelesaikan akar permasalahan²³. Dalam banyak kasus, tindakan represif justru memperdalam ketidakpercayaan dan meningkatkan ketegangan sosial. Oleh karena itu, dialog dan rekonsiliasi menjadi langkah yang lebih efektif dalam menyelesaikan konflik jangka panjang. Contohnya, dalam konflik Maluku, program rekonsiliasi berbasis komunitas berhasil mengurangi ketegangan antara kelompok Muslim dan Kristen. Dengan adanya forum komunikasi yang memungkinkan masing-

²⁰ Gumilar Irfanullah, "Keterlibatan Ikhwanul Muslimin Dalam Konflik Suriah (2011-2019)," *Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (2020): 127–58, <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v8i1.6425>.

²¹ Fikri Surya Pratama, "Kajian Historis Terhadap Perkembangan Resolusi Konflik Etnis Dan Agama Di Bosnia-Herzegovina," *JSI: Jurnal Sejarah Islam* 2, no. 01 (2023): 11–26, <https://doi.org/10.24090/jsij.v2i01.7463>.

²² Desta Lesmana Musthofa et al., "Resolusi Konflik Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Sosial Di Maluku," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 3 (2023): 1017–30, <https://doi.org/10.31604/jips.v10i3.2023.1017-1030>.

²³ Hery Herjawan and Djuni Thamrin, "Transformasi Pemolisian Demokratis Di Papua," *Jurnal Kajian Ilmiah* 23, no. 3 (2023): 281–94, <https://doi.org/10.31599/wxrkwz31>.

masing pihak mengungkapkan aspirasi dan keluhan mereka, pemulihan hubungan sosial dapat terjadi secara bertahap.

2. Kebijakan Inklusif dan Distribusi Sumber Daya yang Adil Diperlukan untuk Mencegah Konflik Berulang

Ketimpangan ekonomi dan diskriminasi dalam distribusi sumber daya sering kali menjadi pemicu utama konflik²⁴. Oleh karena itu, kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan sangat diperlukan untuk mengurangi ketegangan dan mencegah konflik terulang. Dalam konflik Papua, misalnya, salah satu faktor utama yang memicu ketidakpuasan adalah eksploitasi sumber daya alam yang tidak memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat lokal. Pendekatan yang lebih adil dalam distribusi keuntungan ekonomi serta pemberian akses yang lebih besar kepada masyarakat Papua dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi dapat menjadi solusi jangka panjang²⁵.

Kesimpulan

Konflik dan kekerasan di Indonesia bukanlah sekadar insiden sporadis, melainkan manifestasi mendalam dari ketidakadilan struktural dalam sistem politik dan ekonomi. Ketegangan horizontal dan vertikal berakar pada distribusi sumber daya dan kekuasaan yang timpang, sebagaimana dianalisis oleh teori-teori konflik Marx, Dahrendorf, dan Galtung. Studi kasus di berbagai wilayah Indonesia, seperti Kalimantan, Poso, Mesuji, dan Papua, serta perbandingan dengan konflik global, memperkuat pemahaman bahwa ketidakadilan distributif dan politik identitas menjadi pemicu utama eskalasi kekerasan yang berulang. Pendekatan koersif dalam penyelesaian konflik terbukti kontraproduktif. Solusi yang lebih berkelanjutan memerlukan rekonsiliasi yang berlandaskan keadilan sosial. Distribusi sumber daya yang lebih egaliter dan kebijakan publik yang inklusif menjadi kunci untuk memutus siklus kekerasan. Belajar dari keberhasilan rekonstruksi sosial pascakonflik di negara

²⁴ Gigih Satrio Pamungkas, Glory Agnesia Hutaaruk, and Reza Fathurrahman, "Membedah Kebijakan Pemerintah : Strategi Menuntaskan Konflik Pertanahan Demi Keadilan Yang Berkelanjutan," *JiIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 8, no. 1 (2025): 26–37.

²⁵ Paulus Waterpauw, Margaretha Hanita, and Arthur Josias Simon Runturambi, "Analisis Ketimpangan Kepemilikan Komoditas Dan Pemberdayaan Ekonomi Mama-Mama Papua Di Pasar Tradisional Manokwari, Papua Barat," *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 10, no. 2 (2024): 928–44, <https://doi.org/10.29210/020244442> Contents.

lain, seperti Rwanda, Indonesia dapat menempuh jalan perdamaian yang lebih berkeadilan dengan mengatasi akar permasalahan ketimpangan sistemik.

DAFTAR PUSTAKA

- Atem. "Konflik Etnik Madura Dan Melayu Sambas: Tinjauan Konflik Kekerasan Johan Galtung." *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan* 11, no. 2 (2022): 1–16. <https://doi.org/10.37304/jispar.v11i2.5304>.
- Chandra, Frans Kenny, Hubert Niklas, Muhammad Haikal, and Shabila Ocktavia. "Analisis Konflik HAM Yang Terjadi Di Papua." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral* 1, no. 1 (2023): 62–77. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.
- Ernada, Sus Eko Zuhri, Honest Dody Molasy, and Adhiningasih Prabhawat. *Nasionalisme Dan Etnopolitik Dalam Hubungan Internasional: Konsep, Teori, Dan Aplikasi*. Indonesia Emas Group, 2024.
- Herjawan, Hery, and Djuni Thamrin. "Transformasi Pemolisian Demokratis Di Papua." *Jurnal Kajian Ilmiah* 23, no. 3 (2023): 281–94. <https://doi.org/10.31599/wxrkwz31>.
- Hidayat, Agus Rohmat, Nur Alifah, Agis Ahmad Rodiansjah, and Muhammad Zaenal Asikin. "Sengketa Laut Cina Selatan: Analisis Realis Terhadap Perebutan Kekuasaan, Respon Regional, Dan Implikasi Geopolitik." *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 2 (2024): 579–91. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i2.1041>.
- Irfanullah, Gumilar. "Keterlibatan Ikhwanul Muslimin Dalam Konflik Suriah (2011-2019)." *Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (2020): 127–58. <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v8i1.6425>.
- Kaisupy, Delvia Ananda, and Skolastika Genapang Maing. "Proses Negosiasi Konflik Papua: Dialog Jakarta-Papua." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 10, no. 1 (2021): 8298. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i1.27056>.
- Muhammad, Afif. *Agama Dan Konflik Sosial: Studi Pengalaman Indonesia*. Penerbit Marja, 2020.
- Muliono, Muliono. "Pola Perubahan, Wacana, Dan Tren Konflik Sosial Di Indonesia." *Al-Adyan: Journal of Religious Studies* 1, no. 2 (2020): 115–32. <https://doi.org/10.15548/al-adyan.v1i2.1949>.
- Musthofa, Desta Lesmana, Mochammad Afifudin, Agus Adriyanto, and Rudy Sutanto. "Resolusi Konflik Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Sosial Di Maluku." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 3 (2023): 1017–30. <https://doi.org/10.31604/jips.v10i3.2023.1017-1030>.
- Nabilla, Khansa, Rahma Titania, and Dita Aprilia. "Keterlibatan Masyarakat Dalam Isu Lingkungan: Kasus Tambang Emas Di Banyuwangi." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Politik (JPKP)* 2, no. 2 (2024): 153–63. <https://doi.org/10.61476/dv6m0y79>.

- Nanang, Wijaya. "Resolusi Konflik Berbasis Budaya Oleh Masyarakat Kabupaten Poso." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 1 (2016): 58–73.
- Pamungkas, Gigih Satrio, Glory Agnesia Hutaeruk, and Reza Fathurrahman. "Membedah Kebijakan Pemerintah : Strategi Menuntaskan Konflik Pertanahan Demi Keadilan Yang Berkelanjutan." *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 8, no. 1 (2025): 26–37.
- Pokhrel, Sakinah. "Sejarah Otonomi Khusus Papua Sebuah Upaya Menyelesaikan Konflik." *Journal Syntax Idea* 6, no. 9 (2024): 6077–81.
- Pratama, Fikri Surya. "Kajian Historis Terhadap Perkembangan Resolusi Konflik Etnis Dan Agama Di Bosnia-Herzegovina." *JSI: Jurnal Sejarah Islam* 2, no. 01 (2023): 11–26. <https://doi.org/10.24090/jsij.v2i01.7463>.
- Rachman, M. Taufiq. *Agama Dan Politik Identitas Dalam Kerangka Sosial*. Prodi S2 Studi Agama-Agama: UIN Sunan Gunung Djati Bandung Redaksi:, 2020.
- Sabrina, Syifa, Pitri Haryanti, Program Studi, Sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya, and Universitas Komputer Indonesia. "Praktik Ketidakadilan Gender Pada Novel Kushin Techō Karya Emi Yagi." *Mahadaya: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya* 4, no. 2 (2024): 239–48. <https://doi.org/10.34010/mhd.v4i2.13814>.
- Santoso, Syarifurohmat Pratama, and Christine Anggi Sidjabat. *Power Negara*. Depublish, n.d.
- Seftiani, Sari, Cahyo Pamungkas, Irene M. Nadhiroh, and Purnama Alamsyah. *Wajah Pluralitas Yang Tergerus: Intoleransi Dan Radikalisme Di Sembilan Daerah*. PT Kanisius., 2020.
- Stewart, Frances. *Horizontal Inequalities and Conflict. Elgar Handbook of Civil War and Fragile States*, 2008. <https://doi.org/10.1057/9780230582729>.
- Susetiawan, Bahruddin, and Milda L. Pinem. *Pembangunan Sosial Dan Kesejahteraan: Jejak Pemikiran Pendekatan Dan Isu Kontemporer*. Gajah Mada University Press, 2022.
- Waterpauw, Paulus, Margaretha Hanita, and Arthur Josias Simon Runturambi. "Analisis Ketimpangan Kepemilikan Komoditas Dan Pemberdayaan Ekonomi Mama-Mama Papua Di Pasar Tradisional Manokwari, Papua Barat." *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 10, no. 2 (2024): 928–44. <https://doi.org/10.29210/020244442> Contents.
- Wismarini, Theresia Dwiati, Sri Eniyanti, Endang Lestariningsih, R Soelistijadi, and Eka Ardianto. "Identifikasi Pola Konflik Lahan Perkebunan Di Lingkungan PTPN Group Berbasis Data Hukum Menggunakan Hierarchical Clustering Dengan Algoritma Agglomerative." *Jurnal Fasikom* 14, no. 3 (2024): 654–66.